

TITIK TEMU KONFLIK SYIAH-SUNNI PENDEKATAN POLITIK

Oleh
Tabhan Syamsu Rijal
Email: najib1001@yahoo.com
Fakultas Sastra Universitas Bosowa

ABSTRAK

Konflik bersenjata di sejumlah negara Arab dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari konflik Syiah-Sunni yang sudah mengakar hingga ke periode awal sejarah Islam. Syiah dan Sunni saling bertikai tentang siapa yang berhak memegang estafet kepemimpinan sepeninggal Nabi. Konflik Syiah-Sunni beralih dari politik menjadi pertentangan aqidah, diawali dengan pengkultusan kepada keluarga Nabi hingga kepercayaan akan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman dan wilayatul faqih (representasi dari Imam Mahdi). Konflik Syiah-Sunni semakin melebar dan membesar, ketika revolusi Iran tahun 1979 pimpinan Ayatullah Khomeini mulai mengekspor revolusinya ke negara-negara muslim sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan, dan pada waktu yang sama menyebarluaskan pengaruh politik dan ideologi Syiah di kawasan. Momentum politik Syiah kembali mendapatkan tempatnya di beberapa negara Arab pasca Arab Spring, sebuah gerakan *people power* yang berhasil menumbangkan beberapa rezim di negara-negara Arab. Iran sebagai representasi politik Syiah memainkan pengaruhnya di Irak, Lebanon, Suriah, Bahrain dan terakhir Yaman. Kehadiran pengaruh politik Syiah di negara tersebut, berimplikasi terhadap perpanjangan konflik Syiah-Sunni di kawasan. Sekalipun demikian, *Arab Spring* yang menjadi titik balik sejarah demokrasi Arab menuju keterbukaan dan kemandirian diharapkan dapat mendorong pendekatan Syiah-Sunni yang sudah dicetuskan sejak tahun 1948 melalui pendirian Forum Pendekatan Antar Mazhab (*Dar al-Taqrīb bain al-Mazahib al-Islamiya*).

Kata kunci: *Syiah, Sunni, Revolusi, Arab Spring, Pendekatan/Taqrīb dan Politik Syiah.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik panjang Syiah dan Sunni, sejak awal menujukkan pertentangan politik mengenai siapa pengganti Rasulullah Saw. Ahli sejarah Islam sepakat bahwa konflik Syiah dan Sunni dilandasi motif kekuasaan, bukan motif agama (teologi). Keturunan bani Umayah dan keturunan bani Hasyim saling berebut kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah Saw, dan dalam rangka melegitimasi dan meraih simpatik, kedua belah pihak menarik konflik politik ke dalam isu agama. Pasca wafatnya Rasulullah saw, arus besar umat Islam saat itu, secara aklamatif, menghendaki sistem *khilāfah* sebagai model kepemimpinan Islam pasca Nabi, dengan menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertamanya. Pengusung sistem *khilāfah* ini selanjutnya dikenal dengan nama mazhab Sunni. Di luar arus besar tersebut, ada kelompok minoritas yang mengusung bentuk lain, yakni *imāmah* (sebutan para pemimpin Syiah). Karena bertentangan dengan sistem pemerintahan

yang diusung kelompok Sunni, maka secara otomatis kelompok ini membentuk gerakan yang berbeda, dan dari sinilah muncul ide pembentukan mazhab Syiah.

Syiah sendiri secara bahasa berarti pendukung, pengikut, penolong seseorang, atau golongan. Seperti pemakaian kata *Syī'atu Ali* dan *Syī'atu Muawiyah* dalam teks arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan yang berlangsung sekitar 6 bulan pasca perang Shiffin tahun 37 H / 657M. Kata Syiah secara khusus untuk penisbatan pengikut Ali bin Abi Thalib baru terjadi setelah kematian Ali pada 17 Ramadhan tahun 40 H. Menurut Thabathaba'i, seorang intelektual ulama Syiah bahwa sebutan Syiah adalah partisan atau pengikut dari kaum muslimin yang menganggap penggantian Nabi Muhammad Saw merupakan hak istimewa keluarga Nabi, dan mereka yang dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mengikuti mazhab *Ahlul Bait* (aliran pemikiran keislaman yang mengambil sumber dari para keluarga Nabi). Kalangan Syiah yang dimaksudkan di sini

adalah dari sekte Syiah *Itsna Asyariyah* (Dua Belas Imam), Ismailiyah, Zaidiyah, Alwiyah dan sekte-sekte yang tidak masuk kalangan *ghulat* (ekstrim).

Jika menyebut kata Syiah, maka rival sejarahnya adalah Sunni. Kata Sunni mewakili mereka yang mengatasnamakan diri *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah* (dari bahasa Arab) atau lebih sering disingkat *Ahlul-Sunnah* atau Sunni dengan pemahaman keagamaan berdasarkan Alquran dan hadits Nabi serta pemahaman para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in* (sebutan para pengikut setelah masa sahabat). Karena itu, Sunni yang dimaksud di sini meliputi para empat imam mazhab yaitu; Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali dalam bidang fiqh serta Wahhabi atau Salafi dalam bidang gerakan.

Penyebaran pengikut kedua aliran dalam Islam tersebut menurut *Pew Research Institute* tersebar di berbagai negara yang mewakili lebih dari 23% populasi dunia. Dari 1.6 miliar pemeluk agama Islam di dunia saat ini, kalangan Sunni mendominasi sekitar 80% atau menghampiri 1.5 miliar jiwa. Sedangkan Syiah mewakili 20% atau sekitar 350 juta jiwa. Mayoritas warga Syiah berada di negara Iran (95%), Azerbaijan (80%), Bahrain (75%) dan Irak (65%). Negara yang hampir berimbang adalah Lebanon (45%) dan Yaman (45%). Adapun populasi Syiah minoritas berada di Turki (25%), Kuwait (35%), Afghanistan (20%), Pakistan (20-25%), Saudi Arabia (15%), India (20-25%) dari total penduduk), UAE (20%), dan Suriah (15-20%).

Pertentangan antara Syiah dan Sunni bagi sebagian kalangan hanya pada masalah *furu'iyah* (cabang) dan bukan persoalan fundamental agama yaitu aqidah. Pandangan kelompok ini mewakili gerakan pro rekonsiliasi yang mendorong terjalannya pendekatan Syiah-Sunni melalui forum-forum taqrib / pendekatan. Dalam buku *Wahdat Islami* (penyatuan masyarakat muslim), karya DR. Abdulkarim Bazar Shirazi yang membukukan *paper* para ulama Syiah dan Sunni yang telah dicetak dalam majalah *Risalatul Islam* mengatakan:

“Mereka sepakat mengumumkan bahwa: Seorang muslim adalah orang yang mengimani dan meyakini Allah Tuhan alam semesta, Muhammad Saw adalah Nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya,

Alquran kitab samawi, Ka'bah kiblat dan rumah Allah, lima rukun iman yang diakui, hari kiamat serta melaksanakan hal-hal yang dianggap penting. Rukun-rukun ini -yang disebutkan sebagai contoh- telah disepakati oleh para peserta pertemuan, utusan-utusan mazhab yang empat dan utusan-utusan Syiah dari mazhab Imamiah dan Zaidiyah.

Pernyataan di atas, sejalan dengan *Risalah Amman*, sebuah deklarasi dari pertemuan ulama sedunia pada 4-6 Juli 2005 di Amman, ibukota Yordania yang dihadiri sekitar 552 ulama. Di antara poin deklarasi Amman adalah, larangan mengafirkan madzhab-madzhab Islam dan mengupayakan persatuan Islam. Beberapa ulama besar yang mendandatangi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi (ulama Al Azhar dan Ketua Persatuan Ulama Sedunia), Syeikh Ahmad Thayyib (Grand Sheikh al-Azhar), Syeikh Ali al-Salus, Syeikh Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain. Dalam nota kesepahamannya, para ulama mumpuni tersebut sepakat bahwa Syiah madzhab Ja'fari dan Zaidiyah tidak boleh dikafirkan dan darahnya tidak boleh dihalalkan. Bahkan madzhab Ja'fari dimasukkan salah satu mazhab dalam Islam yang boleh diajarkan dan diikuti.

Di lain pihak, kalangan anti rekonsiliasi tidak akan pernah menerima mazhab kalangan Syiah. Salah seorang ulama Arab Saudi, Muhibbuddin al-Khatib (lahir 1886), dalam beberapa karyanya mengungkapkan berbagai dalil tentang kekafiran dan kesesatan pengikut Syiah. Ia menyebut Syiah memiliki Alquran berbeda dengan Alquran yang digunakan Sunni dan berbagai penyimpangan aqidah lainnya seperti rukun imannya hanya 5 (Sunni ada 6), yaitu; *At-Tauhid* (ketuhanan), *An Nubuwah* (kenabian), *Al Imamah* (Imam), *Al Adlu* (keadilan) dan *Al Ma'ad* (Hari Pembalasan/Kiamat). Perbedaannya dengan rukun iman Sunni terdapat pada iman kepada Kitab dan iman kepada Qadar (baik-buruknya dari Allah). Kalangan Syiah menggantinya dengan kepercayaan pada *Imamah* dan iman kepada *Al Adlu* serta membuang iman kepada MalaikatNya. Prinsip keimanan seperti ini masuk dalam wilayah *ushuul* (pokok/ dasar agama) dan bukan *furu'* (cabangnya). Karena itu, penting untuk digarisbawahi bahwa pertentangan Syiah-Sunni dalam beberapa hal memang

masuk dalam wilayah *ushuul*, dan karenanya tidak bisa menutup mata bahwa antara Syiah dan Sunni terdapat pertentangan yang tidak bisa ditolelir.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Titik Temu Konflik Syiah-Sunni Pendekatan Politik sebagai pokok permasalahan. Oleh karena itu, sub masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana latar belakang sejarah konflik Syiah-Sunni
- b. Bagaimana bentuk dan langkah kebijakan politik Syiah pasca Arab Spring.
- c. Bagaimana prospek Pendekatan / *Taqrib* Sunni-Syiah dari ranah politik.

3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengungkap bentuk politik Syiah sejak meletusnya revolusi Islam Iran tahun 1979, dan kebijakan politik luar negeri Syiah pasca Arab Spring dalam bingkai upaya hegemoni Iran di Timur Tengah guna mengimbangi kehadiran kekuatan Amerika dan sekutu-sekutunya yang dinilai telah merusak bangunan kekuatan Islam.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proyek *taqrib* Syiah-Sunni selama ini, dan pentingnya memainkan wilayah politik guna membuka peluang terwujudnya kehidupan yang harmonis antara pemeluk Syiah-Sunni di seluruh dunia.

A. TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang politik Syiah dan Iran secara khusus mendapatkan perhatian yang cukup intens dari para peneliti politik, terutama setelah terjadinya Arab Spring yang secara tidak langsung menarik kepentingan kalangan Syiah untuk memainkan peran yang signifikan di Timur Tengah. Di antara penelitian tersebut adalah:

1. Buku karya Shahata Mohamed Nasser terbitan Dar al Ain, al Kahera tahun 2015 berjudul *السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي...الاستمرارية والتغيير / The Iranian policy towards the GCC countries.. Continuity and change.* Buku ini

menfokuskan penelitiannya pada kebijakan politik luar negeri Iran terhadap *Gulf Countries* (Negara-negara di Teluk), mulai dari latar belakang pengambilan kebijakan politik luar negeri Iran, faktor-faktor penghambat dan peluang kerja sama Iran dengan GCC. Buku ini tidak menyentuh masalah pendekatan Syiah-Sunni.

2. Buku: "مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة" / Permasalahan Pendekatan / *Taqrib* antara Sunni dan Syiah", karya Dr. Nassr bin Abdullah bin Ali al-Ghiffari, Cet. II tahun 1413H. Secara teknis, lingkup bahasan buku ini lebih banyak mengangkat sejarah upaya pendekatan Syiah-Sunni dan perbedaan pemahaman nash-nash keagamaan yang menjadi salah satu faktor kegagalan pendekatan keduanya. Buku ini memang membahas masalah perbedaan Syiah-Sunni, namun penonjolannya masih seperti penelitian lainnya yaitu mengangkat pertentangan Syiah-Sunni dari sisi aqidah yang hanya akan menarik lebih mendalam kepada konflik yang berkepanjangan. Berbeda dengan penelitian ini, lebih fokus pada pertentangan politik yang memungkinkan kedua belah duduk bersama demi kepentingan yang lebih luas.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (*Library Research*). Maka dari itu, metode yang dipergunakan ialah dengan mengumpulkan data-data atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, literatur atau data diklasifikasikan dalam kelompok *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer* ialah dokumen atau pernyataan-pernyataan petinggi Syiah yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini. Sumber primer berupa buku-buku, media cetak dan pemberitaan fakta dalam koran dan jurnal-jurnal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis Framing model Rebert N. Entman yang memiliki kerangka analisis *Definisi Problems* (pendefinisian masalah), Diagnose

causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral) dan *treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Dengan model analisis ini, maka kerangka analisisnya mendeteksi, menyeleksi Isu, penonjolan aspek pemahaman keagamaan kelompok Syiah dan menghubungkan wacana media dengan bentuk wacana umum lain, seperti wacana konflik ideologi Syiah dan Sunni yang berkembang di masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akar pertentangan Syiah-Sunni

Benih-benih konflik politik Syiah-Sunni bermuara pada pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Saw. Pasca pemilihannya, sejumlah pengikut setia Ali bin Abi Thalib diam-diam menolak model pemindahan kepemimpinan kepada Abu Bakar RA. Mereka berpandangan bahwa umat Islam pasca Rasulullah seyogianya dipimpin oleh Imam atau *Imamah*. Menurut pengikut setia Ali, bahwa yang berhak menyandang *Imamah* adalah Ali bi Abi Thalib. *Imamah* bisa diartikan sebagai bentuk keyakinan terhadap penugasan atau penunjukan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah. Dalam kacamata Sunni, doktrin *Imamah* tidak mendasar, karena tidak ada dalil *naqli* atau *nash* Alquran dan hadis Nabi secara jelas yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang harus menjadi pengganti Rasulullah. Berangkat dari doktrin *Imamah* ini, muncullah isu *tahriful* (distorsi) Qur'an, tidak saja secara *maknawi*, tapi juga dari sisi *lafdzi*. Bahkan ada "ritual" melaknat para sahabat yang dianggap tidak loyal kepada Sayyidina Ali dengan sebutan *laknatullah alaih* (yang dilaknak oleh Allah), dan bukan *rahmatullah alaih* (yang dirahmati Allah) seperti sebutuan mayoritas umat Islam ketika menyebutkan para sahabat Rasulullah Saw.

Pada aspek pemikiran politik, mereka berpandangan bahwa siapa pun yang tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti Nabi Muhammad atau yang memusuhi Ali secara politis, diposisikan sebagai musuh. Tidak hanya sekadar memosisikannya musuh, tetapi di antara mereka ada yang menganggap kelompok-

kelompok yang kontra Ali sebagai kafir. Dengan demikian telah terjadi pergeseran secara sistematis dari yang semula sekadar politis menjadi teologis (masalah keyakinan atau ketuhanan).

2. Revolusi Iran dan Kebangkitan Syiah

Pada tahun 1979, Iran yang merupakan negara berpenduduk Syiah terbesar di dunia berhasil melakukan revolusi yang menjadi tonggak sejarah kejayaan Syiah di dunia modern dengan berdirinya negara Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Ayatullah Khomeini. Tokoh revolusi Iran tersebut kemudian mengampanyekan eksport revolusinya, tidak hanya kepada negara-negara tetangga dekatnya, tetapi juga ke beberapa negara di Timur Tengah yang dinilai strategis bagi perluasan hegemoni Syiah di wilayah Arab, seperti Lebanon, Bahrain dan bahkan Suriah dan Yaman yang masih bergejolak saat ini.

Imam Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran menjadikan eksport revolusi sebagai suatu kewajiban. Hal ini pernah ia tegaskan dalam perayaan Tahun Baru Nowroz di Teheran pada tanggal 21 Maret 1980:

"Kita harus mencoba mengekspor Revolusi kita kepada dunia. Kita harus mengesampingkan pikiran bahwa kita tidak perlu mengekspor revolusi kita. Sebab, Islam tidak menarik perbedaan di antara negeri-negeri Umat Islam. Islam adalah pendukung semua masyarakat tertindas di dunia. Di sisi lain, semua negara adidaya tengah bersiap membasmi kita. Jika kita tetap diam dan mengurung diri, kekalahan pasti akan dekat dengan kita.

Dengan identitasnya sebagai negara Islam, Iran (representasi dari ummat Syiah) merasa memiliki tanggungjawab moral untuk menjadi pelindung sekaligus pemimpin bagi Dunia Islam. Mohammad Javad Larijani, teoritis hubungan internasional Republik Islam, menggagas teori *the Mother of the Cities (omm al-qorā') of the Abode of Islam*. Menurut teori ini, eksport revolusi ke seantero dunia muslim adalah tugas inheren bagi Iran sebagai titik episentrum persatuan ummah. Dalam teori ini, Iran diwajibkan melindungi masyarakat Muslim di dunia dari segala bentuk penindasan, baik oleh kekuatan asing maupun pemimpin lokal yang diktator. Teori

ini memiliki landasan konstitusional pada ayat 11 dan 152 di dalam konstitusi Iran. Pihak yang paling merasa terancam oleh kebijakan ekspor revolusi ini adalah tetangga-tetangganya di Teluk. Sesaat setelah berdirinya sebuah negara berdaulat, Iran menyerukan kebangkitan Syiah di kawasan Teluk.

Strategi politik luar negeri yang dimainkan Syiah sejak revolusi Iran diantaranya adalah menghegemoni dunia Islam. Untuk menuju sasaran hegemoni tersebut, Syiah kemudian mendukung gerakan-gerakan perlawanan Islam di negara Arab, seperti dukungan terhadap Hizbulah di Lebanon dan Hamas di Palestina, bahkan dukungan diperlebar kepada lembaga negara, menyusul sikap pemimpin Syiah berdiri membela pemerintahan Bashar Assad di Suriah setelah digoyang oleh oposisi rakyatnya, sebagai efek domino dari Arab Spring.

3. Arab Spring, Momentum Pendekatan Syiah-Sunni

Arab Spring merupakan istilah lain yang diberikan terhadap “Revolusi Dunia Arab” dalam bahasa arab disebut “*al-Thawrat al-'Arabiyyah*”. Adalah serangkaian peristiwa gelombang revolusi, demonstrasi dan protes dalam skala besar yang diawali oleh gerakan *people power* di Tunisia yang berhasil menumbangkan rezim Presiden Ben Ali pada akhir 2010, kemudian berefek domino ke Mesir dan Libya dengan kejatuhan rezim Husni Mubarak dan Muammar Qadhafi serta konflik berkelanjutan di sejumlah negara di Timur Tengah seperti Suriah dan Yaman yang disinyalir tidak lepas dari pengaruh revolusi Iran tahun 1979. Pemimpin besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa *Arab Spring* terinspirasi dari revolusi Iran. Terlepas benar tidaknya pernyataan tersebut, sejumlah pemimpin politik Iran memandang keberhasilan gerakan *people power* di sejumlah negara di Timur Tengah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim tirani adalah peluang strategis bagi Iran untuk kembali memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini terbukti dengan adanya rekonsiliasi politik antara Iran dengan pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Mohamed Morsi yang memenangkan pemilu pada 2011, sekalipun kekuasaannya berakhir

atas kudeta militer pada Juni 2013. Iran juga mampu menancapkan kekuatannya di Bahrain, Suriah dan Yaman meski kemudian memicu konflik internal antara kelompok Sunni dan Syiah di negara-negara tersebut.

Konflik Syi'ah-Sunni yang memiliki akar historis yang cukup panjang, diakui berdampak sangat besar dalam mewarnai perjalanan peradaban dunia Islam yang sulit dikompromikan hingga saat ini. Bahkan konflik ini turut mewarnai prahara politik di Timur Tengah, terutama dunia Arab, sejak bergulirnya *The Arab Spring*. Konstelasi politik yang mengemuka, tidak hanya memomulerkan demokrasi dalam wacana politik Timur Tengah, tetapi juga sentimen Syiah-Sunni turut memanaskan suhu politik. Adalah sebuah fakta bahwa kebanyakan konflik politik yang saat ini berkecambuk di dunia Islam (umumnya di kawasan Timur Tengah) berlatarbelakang agama, dan sebagian menunjukkan konflik mendalam antara Sunni dan Syiah. Perang saudara di Suriah, Yaman dan juga Irak serta pergesekan politik di Lebanon antara kubu 08 Maret (pro Syiria) dan kubu 14 Maret (anti Suriah) adalah bagian dari perpanjangan konflik Syiah-Sunni. Keterlibatan atau keberpihakan Iran terhadap salah satu pihak dalam konflik internal di sejumlah negara di kawasan telah menyeret sejumlah negara yang berbasis Sunni memosisikan diri sebagai rival Iran, sehingga memperlebar konflik Syiah-Sunni di Timur Tengah.

Suriah sebagai koalisi utama dan strategis Iran di Timur Tengah memang banyak menguntungkan Iran dari segi politik, setidaknya mampu memelihara ketegangan dengan Israel dan dunia barat. Hal ini karena Suriah memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan serta terlibat konflik langsung dengan Israel di Dataran Tinggi Golan (wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak tahun 1967). Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok perlawanan Hizbulah di Lebanon Selatan yang berhasil mempertahankan kedaulatan Lebanon dari pendudukan Israel atas dukungan penuh dari Iran, terbukti dengan keberhasilannya memukul mundur tentara Israel dari Lebanon Selatan pada perang tahun 2006. Namun pasca *Arab Spring*, kondisi di Suriah dan Lebanon Selatan tidak lagi sama sebelum *Arab Spring*, sebab Suriah, di bawah

pemerintahan Bashar al Asad (koalisi penting Iran di Timur Tengah) masih terlibat konflik internal, hingga saat ini, yang menyebabkan wilayahnya terpecah-pecah dan kekuatan militernya kesulitan membasmi kelompok pemberontak bersenjata, kecuali atas bantuan militer luar yang menjadi koalisinya. Sementara Hizbullah di Lebanon Selatan lebih banyak disibukkan dengan keterlibatan membantu koalisinya di Suriah dalam membasmi para pemberontak, yang disinyalir dapat memperlemah kemampuannya dalam mengatasi ancaman Israel di Lebanon Selatan.

Melihat kenyataan di dua negara tersebut, dan untuk terus mempertahankan kepentingannya di wilayah Timur Tengah, para Mullah Syiah dituntut untuk mengubah kebijakan politiknya, dari politik ekspansi ideologi kepada politik kepentingan hidup berdampingan. Para Mullah Syiah harus meninggalkan transfer revolusi yang dikampanyekan oleh Ayatullah Khomaeni pasca revolusi 1979, dan memulai kebijakan politik baru yang sejalan dengan kondisi di Timur Tengah saat ini, setidaknya meretas jalan untuk kembali melakukan pendekatan atau bahasa populernya adalah (*taqrib*) Syiah-Sunni setelah gagal sebelumnya.

4. Rekonsiliasi Syiah-Sunni dalam Sejarah

Dalam sejarah pendekatan / *taqrib* atau rekonsiliasi Syiah-Sunni, yang bertujuan menghentikan permusuhan antara mazhab Sunni dan Syiah, telah didirikan sebuah Forum Pendekatan Antar Mazhab (*Dar al-Taqrib bain al-Mazahib al-Islamiya*) pada tahun 1948, melibatkan tokoh-tokoh ternama kelompok Syiah dan Sunni. Di antara mereka yang dari kalangan Sunni seperti; Syeikh Abdul Madjid Salim, Mahmud Syaltut, Abdul Halim Mahmud, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad al- Madani, dan lain-lain. Sedangkan dari kelompok Syiah moderat terdapat Ayatullah Borujerdi, Syaikh Muhammad Taqi al-Qummi, Musa Shadur, Muhammad Husain Kasyif Ghita, al-Amini, Muhammad Ali Taskhiri, dan lain-lain. Forum ini memiliki tujuan mulia, yaitu mendekatkan mazhab-mazhab Islam. Karena itu, pemikiran dasar forum ini adalah dalam rangka mengatasi berbagai macam pertikaian antar umat Islam sendiri, khususnya Sunni dan Syiah.

Dalam perkembangannya, Forum Pendekatan Antar Mazhab Sunni dan Syiah

ini tidak berfungsi sesuai cita-cita pendiriannya. Proses *Taqrib* Sunni-Syiah yang sudah dilakukan sejak lama tidak kunjung membawa hasil. Tapi sebaliknya, *Dar Taqrib* bahkan menjadi pusat penyebaran ajaran Syi'ah. Persoalan mendasar kegagalan *Taqrib* Sunni-Syiah tidak hanya pada niat terselubung Syiah memanfaatkan *Taqrib* untuk kepentingan penyeberan di Dunia Islam, tapi juga penonjolan perbedaan-perbedaan teologi yang terus dikembangkan pada saat memasuki *Taqrib*. Hal ini, menurut hemat penulis, tidak akan pernah berhasil mendekatkan kedua aliran yang banyak pertentangan masalah aqidah di dalamnya. Bahkan lebih dari itu, perbedaan masalah aqidah ini akan mendorong terjadinya konflik fisik antara Syiah dan Sunni seperti terlihat di sejumlah negara Islam, termasuk di Indonesia (kasus di Sampang Madura pada 2012 akibat protes kalangan Sunni atas kehadiran ajaran Syiah di Sampang, menyebabkan konflik berdarah 2 orang tewas dan ratusan pengikut Syiah diusir dari kampungnya).

Kegagalan upaya pendekatan Syiah-Sunni melalui forum di atas pada prinsipnya sudah diprediksi sebelumnya. Sebab kedua belah pihak belum mau beranjak dari wilayah yang dipertentangkan yaitu masalah aqidah. Kalaupun keduanya masih terus mengedepankan persoalan aqidah dalam pelaksanaan *Taqrib* ini, maka diperlukan prasyarat sebagai kesiapan, baik Syiah maupun Sunni untuk saling memahami, seperti diusulkan oleh Muhammad Imarah, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, yaitu:

- a. Mengeluarkan fatwa bersama, untuk tidak saling mengkafirkan antar kelompok
- b. Memutihkan *turâs* / literatur setiap kelompok, khususnya yang dipelajari di *halaqah-halaqah* (pengkajian) keilmuan, dari semua pernyataan pengkafiran kelompok lain.

Lebih dari itu persoalan aqidah adalah wilayah Tuhan yang tidak bisa diintervensi, artinya tingkat keimanan seorang hamba, begitu pula realisasi keimanannya dalam bentuk ibadah vertikal kepada sang Khalik adalah urusan antara hamba dan Tuhan. Dalam Alquran ataupun hadis Nabi, dipastikan tidak ditemukan satu nash / teks yang membolehkan seseorang pemeluk

agama menjustifikasi dirinya sebagai hamba yang paling benar dari sisi keimanan dan ketauhidan, bahkan sebaliknya yang ada adalah larangan menjatuhkan vonis pengkafiran kepada sesama muslim. Diriwayatkan dalam hadis shahih dari Abu Dzarr, Nabi Saw bersabda:

“Barangsiapa memanggil seseorang dengan kafir atau mengatakan kepadanya “hai musuh Allah”, padahal tidak demikian halnya, melainkan panggilan atau perkataannya itu akan kembali kepada dirinya”. (HR Bukhari (no. 3508) dan HR. Muslim (no. 112).

Sejauh ini belum ditemukan sebuah fakta sejarah bahwa kedua aliran tersebut pernah mengeluarkan pernyataan tertulis yang menganulir pemahaman ideologi, khususnya masalah-masalah pengkafiran aliran lain. Baik Sunni maupun Syiah sama-sama berkepentingan untuk menjauhi pertentangan dan lebih mendekatkan persamaan. Jika keduanya tidak bisa disatukan dalam persoalan teologi – karena memang dalam aqidah ada pertentangan mendasar yang tidak akan bertemu hingga hari kiamat, khususnya masalah *imamah* dan *wilayatul faqih* – tetapi masih ada ranah politik yang bisa diwacanakan untuk mendekan keduanya atas dasar pertimbangan kepentingan.

Politik dan kepentingan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Iran misalnya pada 2013, di bawah kepemimpinan Presiden Hassan Rouhani (dari kalangan reformis), bersedia mengubah kebijakan politiknya untuk berunding dengan Amerika yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya. Hal tersebut terlihat dengan ditandatagannya perjanjian antara Iran dengan Kelompok 5+1 (Inggris Prancis, Amerika Serikat, Rusia dan Cina + Jerman) tentang pengurangan pengayaan uranium hanya untuk keperluan damai. Karena itu, pertentangan antara Syiah dan Sunni bukan tidak mungkin bisa dipertemukan, sepanjang kedua belah pihak tidak menonjolkan perbedaan teologi dan lebih mengedepankan kepentingan politik, layaknya dua musuh yang hidup berdampingan secara harmonis karena kemanusiaan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Persoalan yang dihadapi umat Islam selama ini (tidak terkecuali kalangan Syiah dan Sunni) adalah penonjolan dari sisi aqidah dan meninggalkan wilayah politik. Padahal aqidah adalah wilayah Tuhan, dimana hamba tidak boleh intervensi terhadap hak Tuhan, artinya yang mengetahui diterima tidaknya aqidah seseorang adalah Tuhan, dan seorang hamba tidak berhak menjatuhkan vonis pengkafiran kepada seorang hamba hanya karena perbedaan aqidah.
- b. Arab Spring adalah memontum pergeseran politik di Timur Tengah yang menggiring para petinggi Syiah untuk mengubah kebijakan politiknya disesuaikan dengan dinamika politik di kawasan. Karena itu, politik anti barat yang dimainkan oleh Iran sebelum Arab Spring, pada akhirnya bisa duduk bersama dan mencapai kesepakatan dengan kelompok 5+1 terkait pengurangan pengayaan uranium hanya untuk keperluan kemanusiaan.

2. Saran

- a. Baik Syiah maupun Sunni, dalam konteks politik, sama-sama memiliki kepentingan untuk mengurangi ketergantungannya dengan dunia barat, dan ranah ini memungkinkan keduanya bisa berangkulan, selama penonjolannya dari wilayah politik, dan bukan wilayah aqidah. Oleh karena itu, disarankan agar kedua belah pihak tidak lagi saling menyalahkan dalam urusan aqidah, sebab itu wilayah Tuhan dan hanya melibatkan antara hamba dan Tuhannya. Disamping itu, pendekatan Syiah dan Sunni hendaknya melihat dari sisi kepentingan kedua belah pihak saling membangun kekuatan politik guna menghadapi musuh-musuh Islam, apalagi dikenal dalam pameo politik yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.
- b. Masalah pendekatan / *Taqrib* Syiah-Sunni sudah seharusnya meninggalkan wilayah aqidah dan memasuki ranah politik, karena pada politiklah ditemukan kepentingan yang akan membuka peluang rekonsiliasi di antara kedua

aliran yang memiliki pertentangan sejarah yang panjang hingga pertumpahan darah.

DAFTAR PUSTAKA

- Moojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam The History and Doctrine of Twelve Shi'ism*, New Haven and London: Yale University Press, 1985
- Abu al-Fat Muhammad Abd al-Karim ibn Bakr Ahmad al-Shahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dār al-Fikr, 1976
- Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhā fi al-Tasyri' al-Islamy*, Cairo: Dar al-Waraq, 2000
- Sayyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman (ed.), Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (Buku Pertama), terj. Tim Penerjemah Mizan, Bandung: Mizan 2003
- Abdullah bin Umar bin Sulaeman al-Damiji, *Al-Imamah al-Udzma Inda ahli al-Sunnah*, Riyad: Dar Thibah, 1403 H
- Muhammad Abu Zahra; Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1996
- Fuad Mohn Fachruddin, *Syī'ah: Suatu Pengalaman Kritikal*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990
- Said Amir Arjomand, *After Khomeini*, London: Oxford University Press, 2009
- Muhammad Imarah, *Haqâiq wa Syubuhât Hawla al-Sunnah wa al-Syî'ah*, Cairo: Dar el-Salam, 2010